****

IMPLIKASI HUKUM RESTRUKTURISASI **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Menyelesaikan Studi**

**Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD KHOSIIN**

**NPM. 72238000016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

IMPLIKASI HUKUM R ESTRUKTURISASI **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI**

**AHMAD KHOSIIN**

**NPM. 72238000016**

Telah diperiks a dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 8 Agustus 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I  **Dr. Sanusi, S.H.,M.H**  NIDN. 0609086202 | Pembimbing II  **Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H**  NIDN. 0627086403 |
| Mengetahui,  Ketua Program Studi  **Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS.,M.H**  NIDN. 0017115401 | |

# PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Implikasi Hukum Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi” karya :

Nama : AHMAD KHOSIIN

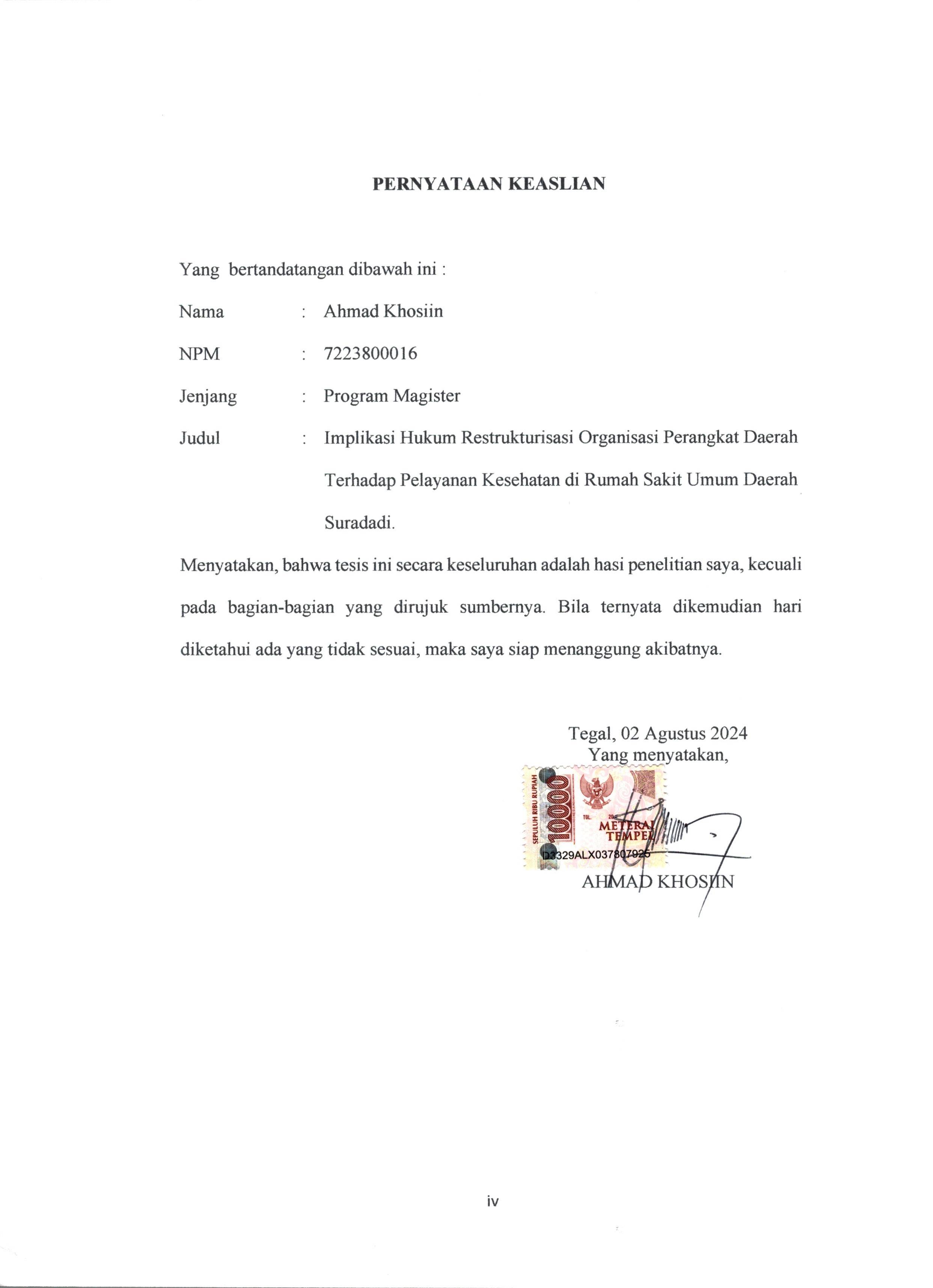
NIM : 723800016

Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024.

**Panitia Ujian**

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua  **Dr.Fajar Ari Sadewo,S.H.,M.H**  NIDN. 0606066001 | Sekretaris  **Prof.Dr.Sitti Hartinah, DS.,M.H**  NIDN. |
| Penguji I,  **Dr.Sanusi, S.H.,M.H**  NIDN. 0609086202 | Penguji II,  **Dr.Soesi Idayanti, S.H.,M.H**  NIDN. 0627086403 |
| Penguji III  **Dr.Achmad Irwan Hamzani, S.Hi.,M.Ag**  NIDN. 0615067604 | |
| Direktur Pascasarjana  **Prof.Dr.Sitti Hartinah, DS.,M.H**  NIDN. 0017115401 | Ketua Program Studi  **Dr.Sanusi, S.H.,M.H**  NIDN. 0609086202 |



# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Khosiin

NPM : 7223800016

Jenjang : Program Magister

Judul : Implikasi Hukum Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi.

Menyatakan, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasi penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila ternyata dikemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

Tegal, 02 Agustus 2024

Yang menyatakan,

AHMAD KHOSIIN

# ABSTRAK

# Tuntutan akan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perkembangan standarisasi yang diminta oleh Lembaga independent Akreditasi Rumah Sakit yang melatarbelakangi terjadinya restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSUD Suradadi, restrukturisasi tersebut didasari dari Peraturan Daerah Kab. Tegal Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021.

# Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Bagaimana penerapan pengaturan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tegal, (2) Bagaimana implikasi hukum retruksturisasi Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi.

# Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif – empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, teknik pengumpulan datadengan melalui studi pustaka, dan studi lapangan serta menggunakan metode analisis data kualitatif yang menghasilkan data/gambaran secara lengkap berupa data tertulis atau lisan.

# Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengaturan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tegal, penerapan atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tegal melalui RSUD Suradadi telah menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik dari jenis pelayanan, sarana prasarana dan jumlah SDMK, dan implikasi hukum retruksturisasi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi terhadap pelayanan kesehatan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan RSUD Suradadi, selain itu dari semua peningkatan tersebut menghasilkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan oleh RSUD Suradadi pada tahun 2023 dengan nilai 83,28 dengan kategori “B” atau kinerja pelayanan “BAIK”.

# Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

# Kata Kunci : Implikasi Hukum, Pelayanan Kesehatan, Restrukturisasi, RSUD Suradadi, Kabupaten Tegal.

# *ABSTRACT*

*The demand for improved health services to the community and the development of standardization requested by the independent Hospital Accreditation Institution is the background for the restructuring of the Regional Apparatus Organization (OPD) of Suradadi Regional Hospital. This restructuring is based on the District Regional Regulations. Tegal Number 7 of 2019, Tegal Regent Regulation Number 73 of 2019 and Tegal Regent Regulation Number 83 of 2021.*

*This research aims to: (1) How are the implementation of Regional Apparatus Organization arrangements for health services in Tegal Regency, (2) What are the legal implications of the restructuring of Regional Apparatus Organizations for health services at the Suradadi Regional General Hospital.*

*This research uses a normative - empirical type of research, the approach used is a normative approach, data collection techniques through library studies and field studies and using qualitative data analysis methods which produce complete data/pictures in the form of written or oral data.*

*The results of this research show that the implementation of Regional Apparatus Organization regulations on health services in Tegal Regency, the implementation of Tegal Regency Regional Regulation Number 7 of 2019 and Tegal Regent Regulation Number 73 of 2019 and Tegal Regent Regulation Number 83 of 2021 on health services in Tegal Regency through RSUD Suradadi has shown an increase in health services provided to the community both in terms of types of services, infrastructure and number of human resources, and the legal implications of the restructuring of the Suradadi Regional General Hospital on health services, namely an increase in the income of the Suradadi Regional Hospital, apart from that, all of these improvements have resulted in a community satisfaction index. (IKM) which has been implemented by Suradadi Hospital in 2023 with a score of 83.28 with category "B" or "GOOD" service performance.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners and all parties in need in the postgraduate environment of the Master of Law Study Program at Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords:*** *Legal Implications, Health Services, Restructuring, Suradadi Hospital, Tegal Regency.*

# MOTTO

# *”tetaplah berdoa, sebagaimana sebelum kita melakukannya. Jika kita ditakdirkan oleh-Nya, tidak ada satu pun yang mampu menghalangi-Nya”*

# *“apa yang telah melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”*

# *(H.R.Umar Bin Khattab)*

# Persembahan :

# Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :

# Alm. Bapak Pahuri dan Ibu Daisah, Orang Tua tersayang dan motivasi dalam mengejar cita-cita.

# Keempat saudara kandung Penulis yang selalu mendukung baik dalam materi dan perkataan.

# Rekam di Magister Ilmu Hukum Unicersitas Pancasakti Tegal yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam penulisan Tesis ini.

# Almamater tercinta Univeristas Pancasakti Tegal.

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, *alhamdulillah* penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat meneyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasullah SAW, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusun Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS., M.M, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Sanusi, S.H., M.H, selaku Ketua Prorgam Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan juga sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I dalam penelitian Tesis saya kali ini.
4. Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Direktur RSUD Suradadi yang telah berkenan memberikan ijin dan data pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Ilmu Pascasarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Stata 2. Mudah-mudahan memdapatkan basalan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
7. Segenap staff administrasi/karyawan Program Magister Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 02 Agustus 2024

**Penulis**

# DAFTAR ISI

Cover i

[LEMBAR PERSETUJUAN ii](#_Toc174704854)

[PENGESAHAN UJIAN TESIS iii](#_Toc174704856)

[PERNYATAAN KEASLIAN iv](#_Toc174704857)

[ABSTRAK v](#_Toc174704858)

[*ABSTRACT* vi](#_Toc174704865)

[MOTTO vii](#_Toc174704866)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc174704876)

[DAFTAR ISI x](#_Toc174704877)

[DAFTAR TABEL xii](#_Toc174704878)

[DAFTAR GAMBAR xiii](#_Toc174704888)

[BAB I PENDAHULUAN 15](#_Toc174704896)

[A. Latar Belakang 15](#_Toc174704898)

[B. Rumusan Masalah 19](#_Toc174704899)

[C. Tujuan Penelitian 20](#_Toc174704900)

[D. Manfaat Penelitian 20](#_Toc174704901)

[E. Originalitas Penelitian 21](#_Toc174704902)

[F. Kerangka Teori Hukum 22](#_Toc174704921)

[G. Sistematika Penulisan 28](#_Toc174704922)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 30](#_Toc174704923)

[A. Teori – Teori Hukum 30](#_Toc174704925)

[B. Norma-Norma Hukum Dalam Restrukturisasi Organisasi   
 Perangkat Daerah 51](#_Toc174704926)

[C. Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah 52](#_Toc174704927)

[D. Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi 58](#_Toc174704928)

[BAB III METODE PENELITIAN 61](#_Toc174704929)

[A. Jenis Penelitian 61](#_Toc174704931)

[B. Pendekatan Penelitian 63](#_Toc174704932)

[C. Sumber Data 66](#_Toc174704933)

[D. Teknik Pengumpulan Data 68](#_Toc174704934)

[E. Analisis Data 68](#_Toc174704935)

[BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 71](#_Toc174704936)

[A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi 71](#_Toc174704938)

[B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 94](#_Toc174704941)

[BAB V PENUTUP 126](#_Toc174704942)

[A. Kesimpulan 126](#_Toc174704944)

[B. Saran 126](#_Toc174704945)

[DAFTAR PUSTAKA 128](#_Toc174704946)

[LAMPIRAN 134](#_Toc174704948)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 136](#_Toc174704949)

# DAFTAR TABEL

## Tabel 1.1 Originalitas Penelitian 20

## Tabel 4.1 Jenis dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan

## RSUD Suradadi Kab. Tegal Tahun 2015 102

## Tabel 4.2 Data Ketenagaan SDMK Tenaga Medis

## RSUD Suradadi Tahun 2024 109

## Tabel 4.3 Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Perawatan 112

## Tabel 4.4 Jumlah Kunjungan Poliklinik Rawat Jalan 2018 – 2023 115

## Tabel 4.5 10 (sepuluh) Besar Penyakit 115

## Tabel 4.6 Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2019 – 2023 116

## 

# DAFTAR GAMBAR

## Gambar 4.1 Gedung Utama Tampak Depan 98

## Gambar 4.2 Pelayanan Rawat Inap 99

## Gambar 4.3 RSUD Suradadi Tahun 2014 101

## Gambar 4.4 Salah Satu Lorong Menuju Bangsal Rawat Inap 102

## Gambar 4.5 Salah Satu Gedung Bangsal Rawat Inap 105

# DAFTAR CHART

Chart 4.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2019 – 2023 122

Chart 4.2 Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 – 2023 123

## Chart 4.3 Realisasi Belanja Tahun 2019 – 2023 124

# 

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang dijamin dan diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secarafrsik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam ruang lingkup kegiatan kesehatan tidak hanya mencakup dalam hal pengobatan, namun terdiri dari peningkatan *(promotif),* pencegahan *(preventif)*, penyembuhan *(kuratif)*, dan pemulihan *(rehabilitatif).* Dalam hal pelaksanaan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dalam hal ini menugaskan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai wadah dalam menjalankan tugas peningkatan *(promotif)* dan pencegahan *(preventif),*  sedangkan Rumah Sakit mengambil tugas untuk menjalankan penyembuhan *(kuratif)* dan pemulihan *(rehabilitatif).*

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Dalam hal pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dilaksanakan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan badan layanan umum (BLU) yang memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan tentang keuangan dan kepegawaian menurut asas perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota/Gubernur. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yanng selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pelaksanaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BLUD harus sejalan dengan upaya peningkatan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Restrukturisasi adalah perubahan struktur organisasi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kekurangan dari struktur lama dengan cara menyusun ulang aset perusahaan, pendanaan perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali korporat. (FIKRI FIRMANSYAH FARID, 2015) Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi organisasi yang merupakan proses mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk

mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. (Dr. Yanti Aneta, 2016) Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi/perusahaan agar organisasi lebih berdaya. (Sedarmayanti, 2014)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah. Sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Persetujuan Gubernur/Bupati/Wakil Bupati. Secara hierarki Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Daerah (Perda) masuk dalam susunan Peraturan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam rangka mengatur administrasi dan peningkatan kualitas hukum/daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih tertata dan teratur.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis professional yang terorganisir baik dari sarana dan prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk dapat memeberi pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pihak rumah sakit dalamhal ini pemenuhan kepuasan pasien membuat pihak rumah sakit harus mampu untuk mengembangkan manajemen mutu yang sebaik-baiknya. Kepuasan pasien dalam hal ini adalah masyarakat tidak cukup hanya jika penyakitnya disembuhkan tetapi pada segi lain, pasien juga menuntut untuk diberi pelayanan sebaik mungkin. Karena pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang memiliki makna bertanggung jawab yang juga sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahtraan masyarakat. (VANESA SONDAKH, 2022) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, RSUD Suradadi merupakan rumah sakit umum daerah yang berstatus rumah sakit type D dengan pola pengelolaan keuangan BLUD berstatus penuh. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019, struktur organisasi dan tata kelola RSUD Suradadi Kabupaten Tegal menjadi rumah sakit umum daerah dengan type C yang terdiri dari 1 Direktur, 1 Kepala Bagian dan 2 Kepala Bidang.

RSUD Suradadi yang merupakan salah satu Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dituntut harus terus memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan survei kepuasan masyarakat yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Hal tersebut yang melatarbelakangi restrukturisasi organisasi RSUD Suradadi dilakukan yang semula type D menjadi type C rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam Skripsi berjudul “Implikasi Hukum Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi”.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana penerapan pengaturan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana implikasi hukum retruksturisasi Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji penerapan pengaturan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum retruksturisasi Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi.

## Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kajian ilmu hukum tata ne2gara, khususnya yang berhubungan dengan restrukturisasi Organisasi RSUD Suradadi dari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah sesuai dengan struktur organisasi yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan.

## Originalitas Penelitian

## Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian | Hasil Penelitiannya | Originalitas Penelitian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udiyati Ardiani, Supardal, 2021Evaluasi Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. | Peneliti ini fokus pada penataan kelembagaan sesuai dengan regulasi yang dapat disampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. | Peneliti akan fokus merumuskan pada Lembaga atau Pemerintah Daerah yang tidak menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| 2. | Lina Marlina Effendi, 2021Upaya Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dalam Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik. | Peneliti ini fokus pada  Analisis Kemungkinan Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Upaya Pemberdayaannya Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, Analisis Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Bandung  dan Hasil Analisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung | Peneliti akan fokus merumuskan pada  penataan kembali dan memperkuat kelembagaan daerah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan publik,  kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan  anggaran yang cukup memadai untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. |
| 3. | Nurul Muchlisa, 2023Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar | Peneliti ini fokus pada mengkaji aspek manusia dan teknologi yang berperan dalam  restrukturisasi organisasi, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkajinya dari perspektif struktur. | Peneliti akan fokus merumuskan pada hasil restrukturisasi organisasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Urang Kabupaten Kepulauan Selayar |

## 

## Kerangka Teori Hukum

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. (Atmosudirjo, 2018)

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel* *van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke* *rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. (Fachruddin, 2004)

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevogdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. (M.Hadjon, 1997)

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan *(autority gezag)* adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatau bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang *(Competence, bevogdheid)* hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (Rechsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. (Hidjaz, 2010)

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled). (Budiardjo, 1998)

1. Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. (Santoso, 2014)

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. (Santoso, 2014)

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli.

1. Keadilan Menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
3. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya. (W.D. Ross, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000) Didownload (Selasa, 11 April 2017)
6. Keadilan Menurut John Rawl

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. (Faiz, 2009)

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *“liberal-egalitarian of social justice”,* berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial *(social institutions).* Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. (Faiz, 2009)

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak diangap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu. (John Rawls, 2011)

Kemudian, prinsip keadilan yang dipakai dalam tesis ini adalah prinsip Keadilan Notonegeoro, suatu kebijakan dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Dengan kata lain prinsip CSR tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, prinsip keadilan yang terdapat dalam konsep CSR, yaitu:

1. prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability.;
2. prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang;
3. prinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial;
4. prinsip keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost structure perusahaan sebagaimana budjet untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. (www.emliindonesia.com, Selasa, 11 April 2017)

## Sistematika Penulisan

Dalam penelitain ini, peneliti merencanakan sistematika penulisan penelitiannya seacara berkesinambungan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakan permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memeprhatikan variable penelitian yang termuat dalam judul.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Kewenangan
2. Teori Keadilan

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III yang memuat Metode Penelitian, didalamnya terdapat atau mencakup sebagaimana berikut :

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai dengan urutan permasalahan dalam sebuah pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V atau Bab Penutup, merupakan inti atau kristalisasi semua permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan permasalahan satu per satu.

Di dalam Bab V juga memuat tentang sebuah kesimpulan dan saran dari peneliti.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Teori – Teori Hukum

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari sebuah kata dasar wewenang yang dapat diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu hal. Kewenanangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begripbevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”* (Winanrno, 2008). Menurut Ateng Syafrudin (Syafrudin, 2000) ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu ”*onderdeel”* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Syafrudin, 2000) Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hokum. (Indrohato, 1994) Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik. (HD, 2004)

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya.Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. (Hadjon, 2005)

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *“onderdeel”* atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden.* Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. (Indroharto, 1994) Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik. (HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, 2004).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*” (Mulyosudarmo, 1990), sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara (Setiardja, 1990).

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah*” (the rule and the ruled)* (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1998)*.*

Sedangkan dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu:

* 1. hukum;
  2. kewenangan (wewenang);
  3. keadilan;
  4. kejujuran;
  5. kebijakbestarian; dan
  6. kebajikan (Kantaprawira, 1998)

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*)sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. (Miriam Budiardjo, 1998)

* 1. Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hokum terutama bagi negara-negara hukum dan continental. (Nitibaskara, 2002)

Menurut Indraharto mengemukan bahwa wewenang diperoleh dengan atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

* + 1. *with atribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislativebody creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
    2. *delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
    3. *with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.* (Schilder, 1998)

J.G. Brouwer mengemukakan bahwa atribusi adalah kewenangan yangdiberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara olehsuatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidakdiambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakankewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya danmemberikan kepada organ yang berkompeten. (Schilder, 1998)

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya (Schilder, 1998).

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; (Hadjon, 2005).
   1. Sifat Kewenangan

Pada dasarnya, sifat kewenangan secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatuf (pilihan) dan bersifat bebas. Hal tersebut sehubungan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan *(besluiten)* dan ketetapan-ketetapan *(beschikingen)* dari unsur pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijakanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memtuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

* 1. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukumdan sistem continental (Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, 2002). Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan *mandate* adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

Dari pengertian kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* mempunyai makna yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan dari sebuah kebijakan atau undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri merupakan sebuah spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, 2014).

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, 2014).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, 2014).

* 1. Keadilan Menurut Para Ahli

1. Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rhiti, Universitas Atma Jaya).

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilankorektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilanakorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut : (Rhiti, Universitas Atma Jaya)

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harusdihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum *(unlawful, lawless)* dan orang yang tidak fair *(unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum *(law-abiding)* dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil (Aristoteles, 2015).

1. Jhon Rawl

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland (Fattah, 2013). Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hokum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Kediamannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege.* John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial (Fattah, 2013). Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan Bersama (Fattah, 2013).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan

*Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesarbesarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup : (Rhiti, Universitas Atma Jaya)

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
2. Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers);
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
4. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

*Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the* *principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk : (Rhiti, Universitas Atma Jaya).

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial (Fattah, 2013).

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situsi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsipprinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan *(call for redress)* masyarakat pada posisi asli *(people on original position)*. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar *(original agreement)* anggota masyarakat secara sederajat (Fattah, 2013).

1. Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik (Nasution M. S., 2017)

1. Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecilkecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif” (Rahardjo, 2014).

1. Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi (Rahardjo, 2014).

1. Adam Smith

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya (Nui, 2012).

* 1. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hokum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsipprinsip umum tertentu. Prinsip–prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang (Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, 2014).

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungnnya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi : (Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, 2014)

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.
   1. Hukum dan Keadilan Masyarakat

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat (Sholehudin, 2011).

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilansubstantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatifyang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Sholehudin, 2011).

## Norma-Norma Hukum Dalam Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah tidak lepas dari terbitnya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, selain bertujuan untuk penataan didalam sebuah Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah, restrukturisasi juga bertujuan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Pada tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Tahun 2019, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal mengubah beberapa nomenklatur nama dan merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti RSUD Suradadi. Di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tegal kembali mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dna Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai dasar bahwa Rumah Sakit Umum Daerah berada dibawah Dinas Kesehatan.

## Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

1. Pengertian Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi yang baik adalah organisasi dinamis yang berkembang setiap waktu sesuai dengan perubahan yang terjadi. Baik itu organisasi dimana organisasi yang ramping serta didukung dengan desentralisasi kewenangan membuat organisasi menjadi fleksibel dalam memberi respon, lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, lebih efektif dan inovatif, serta lebih komitmen kepada tujuan. Struktur ideal dalam merespon perubahan lingkungan adalah struktur yang memberikan ruang bagi anggota organisasi untuk langsung berhadapan dengan konsumen dan dapat mengambil keputusan tanpa melalui proses hirarkis yang terlalu Panjang. (Negak, 1995)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, yakni dengan berlandaskan tepat fungsi dan tepat ukuran *(rightsizing)* yangberdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Restrukturisasi berasala dari kata re- dan struktur, sehingga struktur organisasi berhubungan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Menurut (Hani, 2006) restrukturisasi organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola dimana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsifungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Menurut (Gitosudarmo, 2001) struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi dimana proses untuk menciptakan struktur tersebut, dan pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut dengan nama desain organisasi. Restrukturisasi organisasi sebagai sebuah proses redesain atau penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang telah ada ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal maupun eksternalnya maka birokrasi juga harus mengadaptasi dinamika tersebut agar dapat berkembang. Adaptasi terhadap dinamika yang terjadi menyebabkan birokrasi harus tampil sesuai dengan realita yang ada. Restrukturisasi atau penataan kembali organisasi birokrasi pada hakekatnya adalah aktivitas untuk menyusun satuan organisasi birokrasi yang akan diserahi bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu. (Robbins, 2006)

Restrukturisasi organisasi atau pengembangan sebuah struktur organisasi dilakukan dalam kerangka berpikir baru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang akan disediakan bagi masyarakat. Pengembangan bidang/bagian dalam sebuah Organisasi Perangkat Daerah mempertimbangkan kepentingan internal dan eksternal. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan dengan mengacu pada analisa kebutuhan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar pantai utara jawa (PANTURA) dan khususnya masyarakat Kabupaten Tegal sesuai dengan visi dan misi Bupati Tegal.

Perubahan struktur organisasi adalah perubahan yang dilakukan terhadap sebagian ataupun secara keseluruhan struktur organisai dalam rangka mencari bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi atau dikenal dengan istilah restrukturisasi organisasi. (Sedarmayanti, 2000). Tujuan penataan ulang ini sebagaimana dikemukakan oleh (Steers, 1977) bahwa penataan ulang ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan daya saing organisasi, nilainya bagi para pemegang saham, dan kontribusinya bagi masyarakat.

1. Unsur – Unsur dalam Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Dalam hakekatnya, restrukturisasi atau sering disebut penataan sebuah struktur organisasi perangkat daerah terjadi karena adanya kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai visi dan misi sebuah Perangkat Daerah atau sebuah Pemerintahan Daerah yang akan memunculkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Faktor Lingkungan
2. Eksternal

Menurut (Saladin, 2003) menjelaskan bahwa lingkungan eksternal adalah faktor – faktor yang berada diluar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang dan ancaman. Sementara menurut (Nuhung, 2012) Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan dan dapat berpengaruh langsung terhadap prospek perusahaan, yang terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan industri.

Terbitnya Peraturan yang dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dna Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang menjadi dasar hukum dalam melakukan restrukturisasi atau penataan serta dukungan Pemerintah dalam memberikan anggaran atau dana untuk melaksanakan restrukturisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah.

1. Internal

Faktor internal adalah elemen-elemen yang berada dalam kendali perusahaan dan dapat dimodifikasi atau ditingkatkan untuk mendukung tujuan bisnis. (Creativepreneurship, 2024) Menurut (Haryono, 2014) sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ini sering disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas.

Restrukturisasi tidak lepas dari adanya penambahan sumber daya manusia (SDM) dan jenis layanan publik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini RSUD Suradadi. Sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan bekerja sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) serta sesuai dengan standar akreditasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah sehingga menjamin pelayanan yang diberikan berkualitas secara mutu dan keselamatan pengguna layanan (pasien).

1. Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. (Antonio, 2001)

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, daneksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. (Tjiptono, 2000)

Strategi dalam penerapan restrukturisasi yaitu menciptakan sebuah inovasi. Terobosan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang seuai dengan standar prosedur operasional (SPO) dan elemen akreditasi dan tidak lupa juga dengan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik dan ramah merupakan salah satu bentuk terciptanya sebuah inovasi yang akan diberikan kepada masyarakat setelah adanya restrukturisasi guna mencapai kepuasan masyarakat. Setelah dilakukan restrukturisasi, terdapat perubahan dalam segi manajemen baik jenis pelayanan maupun pemangku kebijakan dalam organisasi tersebut.

1. Teknologi

Menurut (James A, 2006) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Teknologi dalam hal ini mencakup sarana prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung kinerja baik Pegawai maupun Pejabat di RSUD Suradadi.

## Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi

* 1. Tugas dan Wewenang

Tugas pokok RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan *(kuratif),* pemulihan *(rehabilitative)*, upaya peningkatan *(promotif),* pencegahan terjadi penyakit *(preventif)*, melaksanakan upaya rujukan dan pelayanan yang bermutu, prima dan paripurna sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana fungsi RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
2. pemberian dukungan atas terselnggaranya pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
4. melaksanakan ketatusahaan, perencanaan program dan evaluasi pelayanan dan keperawatan;
5. pelaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   1. Visi dan Misi
      * 1. Visi

“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Dengan Layanan Unggulan Traumatik dan Rehabilitasi Medik”

* + - 1. Misi

1. Meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan dan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel;
2. Meningkatkan sarana prasarana dan SDM RS untuk menunjang layanan unggulan traumatik dan rehabilitasi medik;
3. Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung layanan unggulan berbasis Terapi Wisata Bahari.
   1. Falsafah Pelayanan

“Kepuasan anda adalah kewajiban dan tanggung jawab kami”. Pelayanan kesehatan yang diberikan atas dasar ketulusan, profesionalisme, keterbukan dan paripurna agar tercapai pelayanan yang berkualitas tinggi.

* 1. Motto Pelayanan

“Sehat Bersama Kami”. Motto RS Suradadi yang menjadi andalan dan motivasi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengunjung, karyawan agar tercipta semua elemen yang sehat baik dalam pelayanan medis maupun pelayanan administratif.

* 1. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan RSUD Suradadi, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
2. Bersedia memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.